

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN INTERNAL DOSEN
Progam Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi



IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI DAN PERMASALAHAN SOSIAL
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018-2022

Tim Peneliti:

ELIKA FEBRIANTI, S.E. M.E.
FAHRIZAL TAUFIQURACHMAN, S.E., M.Se.
SITI RIZQIYATUL MUNAWAROH
MEI RIA RAHAYU

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2024/2025

Nomor Kontrak:

036 / LPPM-LIT / UB / XI / 2024

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2024

HALAMAN PENGESAHAN

PROPOSAL PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI DAN PERMASALAHAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018-2022
2. **Ketua Peneliti**
 - a. Nama Peneliti : Erika Febrianti, S.E., M.E.
 - b. NIDN : -
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : elikafebriantiFE99@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Perencanaan Pembangunan
3. **Anggota Peneliti 1**
 - a. Nama : Fahrizal Taufiqqurachman, S.E., M.Se.
 - b. NIDN/NIM : 0722119203
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : fahrizaltaufiqqurachman@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Perencanaan Pembangunan
- Anggota Peneliti 2**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Siti Rizqiyatul Munawaroh
 - b. NIM : 21602011190
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : rizkiyatuloke@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan
- Anggota Peneliti 3**
 - a. Nama (Mahasiswa) : Mei Ria Rahayu
 - b. NIM : 21602011178
 - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
 - d. E-mail : meiria459@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan
4. Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur
7. Dana Diusulkan :

Bojonegoro, 25 Desember 2024

Mengetahui,

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Erika Febrianti, S.E., M.E.
NIDN.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Berkah, Rahmat, Karunia dan RidhoNya, tim peneliti dapat menyusun Laporan Penelitian yang berjudul: “IDENTIFIKASI POTENSI EKONOMI DAN PERMASALAHAN SOSIAL DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018-2022”. Laporan Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Kelompok Dosen dengan Mahasiswa di lingkungan Universitas Bojonegoro. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rektor Universitas Bojonegoro yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang “Kausalitas Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”
2. Bapak/Ibu Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Bojonegoro atas kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
3. Ibu Dekan beserta Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Bojonegoro atas curahan semangat serta kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
4. Ibu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bojonegoro beserta tim yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.
5. Bapak/Ibu para Dosen senior dan rekan-rekan di Universitas Bojonegoro yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Akhirnya, peneliti mengharapkan agar Laporan Penelitian ini dapat memenuhi fungsinya sebagai khasanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang Ekonomi Pembangunan. Peneliti menyadari pula bahwa Laporan Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan Laporan Penelitian ini. Peneliti tak lupa menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan Laporan Penelitian ini terdapat kekeliruan dan kekurangan. Demikian, dan terima kasih.

Bojonegoro, Desember 2024

Peneliti.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	8
2.2. Penelitian Terdahulu	11
2.3. Kerangka Konsep Penelitian.....	14

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
3.2. Lokasi Penelitian	16
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	16
3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	17
3.5. Analisis Data	18

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	27
6.2 Hasil dan Analisis	30
6.3 Pembahasan	40

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	46
5.2 Rekomendasi	47

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti <i>Submit</i> Artikel	50
Lampiran 2. OJS Terindeks SINTA	52

RINGKASAN

Potensi ekonomi dan permasalahan sosial menjadi sebuah topik pembahasan yang tidak pernah habis dan selalu bersifat dinamis. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang dapat digunakan untuk mengindikasi atau mengetahui potensi unggulan setiap daerah. Kondisi ini di iringi permasalahan sosial tinggi di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dan *Dinamis Location Quotient* (DLQ) untuk menentukan potensi ekonomi, adapun untuk menganalisis masalah sosial menggunakan Teknik *Clustering*. Hasil penelitian menunjukkan beberapa sektor yang merupakan potensi ekonomi di kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 adalah sektor sektor Pertambangan dan Penggalian, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Informasi dan Komunikasi, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dan Konstruksi. Sektor-sektor ini berdasarkan hasil perhitungan DLQ termasuk pada kriteria unggulan dan potensial. Adapun hasil analisa permasalahan sosial berdasarkan data PMKS di Kabupaten Bojonegoro, pengelompokan kabupaten di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial dibagi menjadi 2 cluster (tinggi dan rendah) dengan nilai silhouette 0,7275 yang menunjukkan kekuatan cluster mempunyai struktur kuat. Terdapat 7 kecamatan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tinggi dan tergolong dalam cluster 1. Di cluster 2 terdapat 21 kecamatan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang rendah dibandingkan dengan cluster 1. Dari data PMKS yang memiliki nilai tertinggi adalah fakir miskin di kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018-2022.

Kata Kunci : Potensi Ekonomi, PMKS, LQ, DLQ, Clustering.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Indonesia sebagai negara emerging economies selalu mengupayakan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Proses pencapaian dapat dilakukan salah satunya dengan memperhatikan permasalahan masyarakat yang terjadi disertai dengan melakukan pembangunan berkelanjutan (Jiao et al, 2020). Sementara itu, pembangunan berkelanjutan merupakan usaha atau proses menuju perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang (Yusuf, et al. 2017). Setiap proses pembangunan pasti melibatkan berbagai perubahan baik dari aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Menurut Todaro & Smith (2013), komponen utama atau nilai inti dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dari mata pencaharian, harga diri dan kebebasan yang merupakan tujuan utama, sehingga harus dicapai oleh setiap masyarakat.

Pembangunan menjadi salah satu mekanisme yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan nasional, dimana salah satunya dapat dilihat berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu tolok ukur pembangunan suatu negara atau daerah (Mirza, 2012). Proses pembangunan yang berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi salah satu tujuan utama di negara berkembang. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Marini (2016) yang menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tolak ukurnya yaitu pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan tingkat kesenjangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. Hal ini juga dikarenakan angka pertumbuhan ekonomi merupakan representasi dari jumlah output atau jasa yang dihasilkan dalam suatu masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu, jumlah barang yang diproduksi diperkirakan meningkat, diikuti dengan kesejahteraan masyarakat yang juga akan meningkat (Mirza, 2012). Hal ini sesuai dengan pernyataan pada model pertumbuhan ekonomi Solow (Solow Growth Model),

bahwa perekonomian memproduksi dan menggunakan outputnya pada suatu waktu tertentu (Mankiw, 2006).

Menurut pandangan awal, pembangunan dianggap hanya tugas dan kewajiban pemerintah dan negara, rakyat hanya diposisikan sebagai objek pasif dalam proses pembangunan. Tetapi, saat ini muncul pandangan bahwa dalam proses pembangunan tidak lagi hanya tanggungjawab pemerintah saja, namun sudah mulai melibatkan masyarakat dan pihak ketiga, seperti pelaku usaha maupun kelompok kepentingan lainnya (Yusuf, et al. 2017). Kompleksitas proses pembangunan tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan semua elemen masyarakat, sehingga peran-peran sumber daya serta regulasi sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pembangunan.

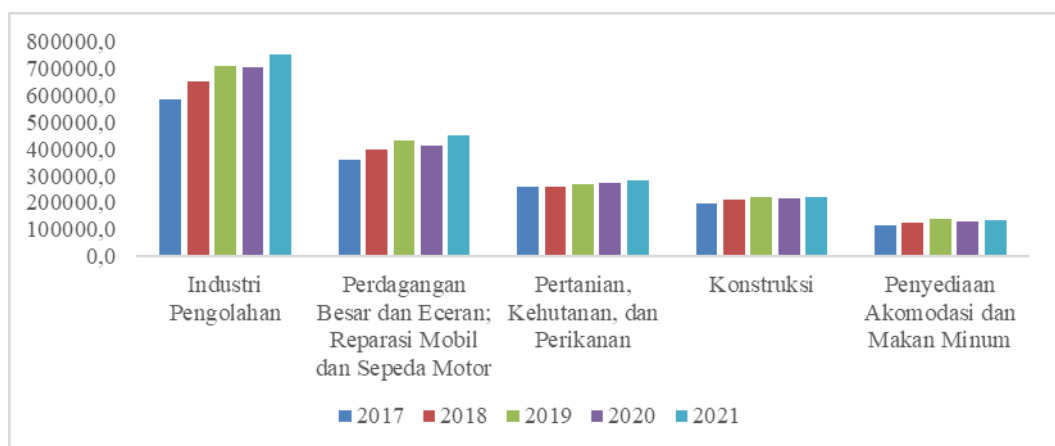
Pembangunan daerah yang melibatkan semua elemen kehidupan masyarakat secara khusus sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Hal ini sesuai dengan masalah pokok ekonomi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Kompleksnya arah pembangunan yang dilakukan mengindikasikan bahwa setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing yang dapat dituangkan dalam bentuk peraturan. Keberagaman kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menjadi indikasi dalam menentukan kriteria pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya, sehingga potensi ekonomi di setiap daerah dapat terwujud sesuai dengan arah pembangunan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 bahwa terdapat kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya untuk mendorong pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup. Pernyataan ini sesuai dengan Zhang & Yang (2023) yang menyatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan global mempunyai isu yang sangat penting yaitu pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya dalam menentukan potensi ekonomi atau unggulan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat, dimana semakin banyak barang dan jasa yang

diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat meningkat sehingga kualitas aparaturnya meningkat (Baeti et al., 2013). Tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat diukur dengan pertumbuhan pendapatan riil negara itu sendiri. Kegiatan ekonomi mengubah pendapatan nasional riil dari waktu ke waktu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin besar kemungkinan keberhasilan dan ekonomi negara yang kuat (Kusumawati et al., 2021).

Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi hingga sebagai penggerak swasembada pangan baik bersifat primer maupun substitusi. Hal tersebut dibuktikan dengan angka persentase distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2020-2022 dijelaskan dalam Gambar 1.3.

Gambar 1. 1 PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2022 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Jawa Timur, 2022

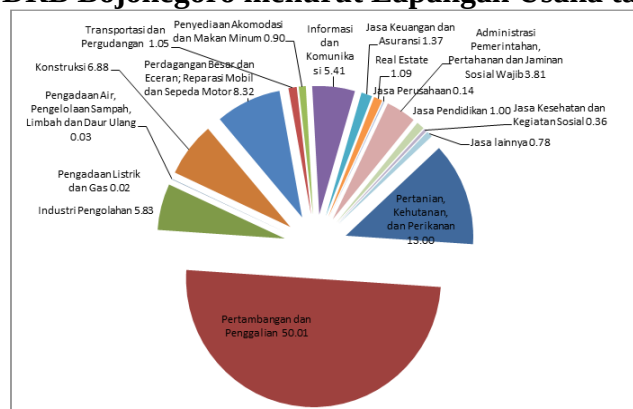
Berdasarkan Gambar 1.3 dapat dinyatakan bahwa pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha, namun berdasarkan pemeringkatan angkut tertinggi dalam PDRB maka diperoleh kelima sektor sesuai pada gambar di atas, sehingga dapat diketahui bahwa sektor industri pengolahan dalam kurun waktu lima tahun mempunyai angka paling tinggi dalam mendukung PDRB Provinsi Jawa Timur yaitu pada persentase 3,55 persen. hal ini di susul oleh ke empat sektor lainnya yaitu sektor Perdagangan besar dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,24 persen. Adapun sektor yang berkontraksi yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar -23,70 persen. Ditambah oleh sektor konstruksi yang mempunyai peningkatan sebesar

2,17 persen serta lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,71 persen sehingga menempati urutan kelima dalam pemeringkatan persentase tertinggi dalam PDRB Provinsi Jawa Timur.

Mengetahui hal tersebut dapat digambarkan bahwa, apabila mengetahui potensi sektor unggulan secara tidak langsung berarti juga dapat menentukan bahwa wilayah tersebut tergolong maju atau tidak dari kategori potensi yang dimiliki. Dengan kata lain, sektor unggulan merupakan sumber potensi untuk meningkatkan pertumbuhan wilayah tersebut. Dalam rangka pembangunan wilayah berkelanjutan ditentukannya sektor-sektor prioritas merupakan langkah penting agar dapat menjadi mesin pertumbuhan serta dapat menjadi leading sector bagi sektor-sektor lainnya. Dengan terpilihnya sektor prioritas tersebut atau sektor yang berpotensi maka diharapkan sektor-sektor pembangunan lainnya akan ikut terdorong, sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional maupun pembangunan wilayah sesuai dengan tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangan ekonomi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah atau regional dalam satu periode tertentu adalah data (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas harga konstan. Berikut Gambar 1.4 mengenai rincian PDRB Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1.4
Sebaran PDRB Bojonegoro menurut Lapangan Usaha tahun 2018



Sumber: BPS, Kab. Bojonegoro, 2028

Terdapat 17 sektor dalam PDRB tersebut berdasarkan kategori lapangan usaha yang sebagian besar sektor dijabarkan menjadi beberapa subkategori kembali untuk lebih diperinci. Sektor pertambangan dan penggalian yang mempunyai persentase tertinggi dalam angka PDRB Bojonegoro tahun 2028. Meskipun pertambangan merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui akan tetapi keberadaanya mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap sumber pendapatan negara maupun daerah jika dilihat dari hasil yang mampu diperolehnya. Urutan selanjutnya ada sektor pertanian yang mempunyai hasil unggulan yaitu padi, jagung, jenis polowijo, tembakau serta pohon jati yang menjadi andalan petani kabupaten Bojonegoro. Jika dilihat pada gambar 1.4 mengenai rincian PDRB Bojonegoro, angka yang mendominasi diperoleh dari sumber daya alam yang tersedia di wilayah tersebut. Masing-masing sektor ekonomi memberikan sumbangan yang berlainan besarnya dengan menyumbang besar kecilnya angka terhadap PDRB kabupaten Bojonegoro.

Pertambangan dan penggalian di wilayah kabupaten Bojonegoro memang sebagian besar tidak menjadi kendali atau sumber operasional pemerintah Kabupaten Bojonegoro, akan tetapi secara tidak langsung sumber minyak dan Gas bumi terbesar se asia terdapat diwilayah kabupaten Bojonegoro ini dapat menyumbang sumber pendapatan negara hampir 25% pertahunya. Sumber minyak alam dan gas bumi yang sering disebut migas ini tersebar diberbagai titik hingga mampu menghasilkan 1 (satu) juta barel perharinya. Keberadaan sektor migas tersebut sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2011 tentang percepatan-percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di kabupaten Bojonegoro. Perda tersebut secara runtut dan lengkap menjelaskan tentang tanggungjawab, hak, kewajiban dan larangan sektor migas terhadap kabupaten Bojonegoro. Perda adalah salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam proses pemanfaatan dan pengolahan dari keberadaan dan pengaruh sektor migas di kabupaten Bojonegoro.

Pembangunan kabupaten Bojonegoro terkait pencapaian visinya, dimana pembangunan yang dilakukan harusnya berdampak pada permasalahan sosial Masyarakat. Potensi ekonomi yang terus menerus dapat dicapai oleh suatu daerah jika daerah tersebut selalu memperbaiki aspek-aspek krusial yang ada di daerahnya. Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu daerah kaya dan melimpah potensi berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tetapi tidak diimbangi dengan dengan kondisi sosial masyarakatnya yang masih mengalami permasalahan sosial yaitu kemiskinan dengan angka prosentase yang relatif tinggi. Peraturan Pemerintah, kebijakan normatif maupun Otonomi diharapkan mampu lebih mengoptimalkan kebebasan dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki. Potensi tersebut yang nantinya dapat dijadikan sebagai tombak pembangunan suatu daerah, salah satunya meminimalisir permasalahan kemiskinan. Dari uraian tersebut menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian apa yang sebenarnya terjadi dengan tingkat kemiskinan di wilayah yang kaya sumber daya alam ini, sehingga penelitian ini diambil dengan judul **Identifikasi Potensi Sumber Ekonomi Dan Permasalahan Sosial di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana indentifikasi potensi ekonomi di Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana indentifikasi permasalahan sosial di kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis indentifikasi potensi ekonomi di Kabupaten Bojonegoro
2. Menganalisis indentifikasi permasalahan sosial di kabupaten Bojonegoro

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dan menjadi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

a) **Manfaat Akademik**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara luas khususnya memberikan wawasan tentang keilmuan ekonomi studi pembangunan dalam bidang perencanaan dan pembangunan regional. Terutama pembahasan pada kausalitas pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi (dibuat) sumber referensi atau bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam upaya mewujudkan penelitian yang lebih baik serta berkelanjutan.

b) **Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai sarana bagi penulis dalam mengemukakan pendapat tentang suatu permasalahan tertentu dalam bentuk sistematis serta mampu memberikan solusi permasalahan tersebut berdasarkan metode ilmiah. Terdapat harapan pula yang dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dalam peningkatan kualitasnya, khususnya dalam hal kausalitas yang ditinjau dari pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Timur. Serta penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sri Suryaningsum, Moch. Irhas Effendy, Raden Hendry Gusaptono melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “ Tata Kelola Pemerintahan dan Potensi Sumber Daya Bojonegoro untuk Peningkatan Kesejahteraan”. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mendiskusikan tentang perkembangan pemerintah Bojonegoro yang difokuskan sejak tahun 2008 hingga 2018 mengenai adanya sumber daya Bojonegoro yang hendaknya dikelola dan dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Alat analisi yang digunakan adalah menggunakan metode pengumpulan data dari berbagai sumber. Berdasarkan analisi berbagai sumber yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Bojonegoro berkembang dari waktu ke waktu di bawah pimpinan Suyoto. Suyoto dianggap berhasil memimpin Bojonegoro dengan menerapkan sistem demokrasi terbuka, dengan didasari pilar pembangunan Bojonegoro. Sumber daya yang ada di Bojonegoro juga dimanfaatkan dan diberdayakan dengan baik. Sehingga seluruh aspek di Bojonegoro juga dimanfaatkan dan diberdayakan dengan baik. Sehingga seluruh aspek di Bojonegoro dapat berkembang dengan baik.

Agus Tri Laksana dan Siti Zulaika melakukan penelitian pada tahun 2018 dengan judul “Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981-2008”. Penelitian tersebut mempunyai tujuan untuk Menjawab Persoalan (1) Apa yang melatar belakangi kemiskinan yang ada di kabupaten Bojonegoro antara tahun 1981-2008? (2) Mengapa kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang masuk kategori miskin antara tahun 1981-2008) (3) Bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di kabupaten Bojonegoro tahun 1981-2008. Alat analisi yang digunakan yaitu metode sejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro disebabkan karena sumber daya manusia yang masih rendah. Kurangnya inovasi, kreativitas dan kesempatan untuk bersosialisasi juga mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan, diantaranya persoalan masyarakat yang melingkar antara lemahnya

masyarakat yang miskin dalam mengembangkan potensi diri dan tertutupnya potensi diri untuk lebih berkembang di kalangan masyarakat. Kemudian birokrasi pemerintah daerah selama tahun 1981-2008 masih kurang baik, sehingga menyebabkan kemiskinan yang berkelanjutan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Kabupaten Bojonegoro berada dalam kategori kemiskinan yaitu termasuk wilayah Kabupaten Bojonegoro sendiri, kurangnya irigasi, termasuk daerah terisolir dan peran pemeritahan yang kurang baik. penanggulangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan melakukan revitalisasi pembangunan daerah, serta memperbaiki beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.

Tri Wahyu Rejekiningsih melakukan penelitian pada tahun 2011 dengan judul “Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang Dari Dimendi Kultur”. Tujuan dari penenelitian ini adalah Mendeskripsikan dan mengidentifikasi karakteristik masyarakat miskin di kota Semarang. Alat analisa yang digunakan penelitian ini melalui pendekatan dimensi kultural yaitu berupa operasional variabel (data primer dan data sekunder). Hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik warga miskin di kota Semarang antara lain : kepala rumah tangga sebagian besar berpendidikan rendah (tamat SD), bekerja sebagai buruh, dan mempunyai tanggungjawab *three* jiwa. Selain itu diketahui bahwa terjadi adanya ketidakmerataan dalam distribusi bantuan kepada warga miskin. Terkait dengan analisis dari dimensi kultural diketahui bahwa warga miskin di kota Semarang memiliki nilai budaya dan sikap mental yang positif dalam memandang hakekat hidup, hakekat karya, hakekat waktu, hakekat hubungan dengan alam semesta dan sesama manusia.

Yunu Catur Wulan, Nurul Umi Ati, Roni Pindahanto Widodo melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE)”. Fokus dalam penelitian ini adalah Potensi Kelompok Bersama binaan dari Kemensos dan Dinas Sosial, Peran serta Pemerintah Kota Probolinggo dalam penanggulangan Kemiskinan, serta faktor yang menjadi

penghambat dan pendukung KPM yang terjadi di daerah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, sesungguhnya dirasakan sebagai salah satu strategi yang cukup ampuh untuk mengatasi berbagai gejala dari perubahan struktural di sektor industri dan pertanian serta mengurangi dampak terjadinya kemiskinan. Sebagai akibat dari berkurangnya lapangan pekerjaan dalam usaha tani di pedesaan maupun di wilayah perkotaan, juga berpengaruh terhadap kaum wanita sebagai salah satu komponen rumah tangga. Atas dasar hal tersebut diatas, saat ini Kementrian Sosial RI sedang gencar memberikan stimulan bantuan pendirian e-Warong dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Sasaran utama dari stimulan bantuan tersebut adalah para peserta Program Keluarga Harapan (PKH). Dari program ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mensejahterakan peserta PKH pada khususnya, para penerima manfaat di sekitar lokasi KUBE dan e-Warong. Dengan berkelompok, permasalahan yang di hadapi akan dibicarakan bersama. Tidak hanya permasalahan dalam bertetangga sehari-hari. Dari terbentuknya kelompok ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan bagi anggota kelompok pada khususnya. Oleh karena itu bantuan permodalan bagi kelompok sangat penting bagi pertumbuhan usaha produktif anggota kelompok tersebut.

Odha Adhitama, Bambang Santoso, dan Riyanto melakukan penelitian pada tahun 2015 dengan judul “kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah di kabupaten Bojonegoro”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan kontribusi sektor migas terhadap penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan sektor migas di Kabupaten Bojonegoro. Alat analisa yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kontribusi sektor migas terhadap Bojonegoro sangat besar, yaitu meningkatkan penerimaan daerah melalui DBH dan Dana Perimbangan Daerah, penggerak pembangunan daerah, dan membuka lowongan pekerjaan. Dalam hal ini,

sektor migas telah terbukti kontribusinya terhadap pembangunan daerah Bojonegoro.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu tujuan pembangunan suatu daerah adalah meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Perekonomian wilayah diperoleh dari berbagai sektor yang menjadi aktivitas masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Penetapan ukuran pertumbuhan ekonomi salah satunya bisa dilihat berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari wilayah tersebut pada periode tertentu. Produk Domestik Regional Bruto merupakan semua barang dan jasa yang beredar akibat aktivitas kegiatan perekonomian di wilayah yang bersangkutan, tanpa mempertimbangkan apakah Produk barang dan jasa tersebut berasal atau dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Terori baru pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis sumber daya alam menjelaskan bahwa potensi kekayaan sumber daya alam (*resource endowment* atau *factor endowment*) yang dimiliki sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengembangan ekonomi suatu wilayah, wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang potensial, umumnya perkembangannya lebih maju jika dibandingkan dengan wilayah yang memiliki sumber daya alam yang kurang. Menurut teori ini, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi dua diantaranya: faktor ekonomi (seperti sumber daya alam, kemajuan teknologi, dll) dan faktor non ekonomi (meliputi sumber daya manusia, faktor sosial, dll) yang disampaikan oleh North (1964) pada buku Arsyad (2010).

2.2.2 Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (2010) Pembangunan daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumber daya yang ada dan membentuk institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan

pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Tujuan utama pembangunan daerah sebenarnya lebih ditekankan dan diarahkan pada pengurangan dalam hal ketimpangan pendapatan yang terlalu mencolok, dan pemberian pelayanan sosial terhadap masyarakat yang lebih baik. Untuk melaksanakan strategi tersebut, diperlukan tidak saja struktur organisasi komando departemental yang seringkali tidak efisien dalam realisasinya, tetapi juga terutama adanya suatu wadah lokal yang dapat menampung aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan regional tersebut.

Menurut Nugroho dan Dahuri (2012, h. 12) pembangunan wilayah atau daerah merupakan konsep yang utuh dan menyatu dengan pembangunan wilayah. Secara luas pembangunan daerah diartikan sebagai upaya yang merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan optimal dan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa harus merusak pemenuhan kebutuhan mendatang. Berdasarkan prinsip tersebut pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek kebijakan yaitu : pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan. Tiga aspek tersebut merupakan faktor penting dalam proses pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Karena fokus dari pembangunan berkelanjutan adalah pada pembangunan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi pembangunan yang dilakukan harus juga memprioritaskan pada masa yang akan datang. Sehingga kebijakan pembangunan perlu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan dapat menciptakan kesinambungan pembangunan dengan memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi daerah.

Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro mempunyai aturan atau landasan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada periode tertentu sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bojonegoro. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bojonegoro untuk periode 20 tahun terhitung mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Dokumen RPJP menjadi

acuan dalam pembuatan rencana pembangunan daerah per lima tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam perda No. 7 tahun 2013 sebagai upaya atau strategi yang dilakukan untuk mencapai visi yang tertulis dalam RPJP kabupaten Bojonegoro yang terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

2.2.3 Potensi Daerah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Potensi berarti kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan dan daya. Potensi atau keunggulan dari suatu wilayah bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi masalah sosial yang terjadi salah satunya kemiskinan. Pengembangan potensi tersebut biasa dilakukan untuk memaksimalkan pembangunan daerah berdasar kekayaan yang dimiliki di lokasi tersebut. Menurut Arsyad (2010) daerah (*Region*) mempunyai definisi berdasarkan aspek ekonomi yaitu sebagai daerah homogen, daerah nodal, dan daerah perencanaan atau daerah administrasi. Sehingga potensi suatu wilayah sangat erat kaitanya dengan pertumbuhan ekonomi daerah seperti pada teori lokasi yang mengatakan bahwa *Lokasi, lokasi, dan lokasi!*. Yang menjelaskan bahwa lokasi yang terbaik adalah lokasi dengan biaya termurah, antara bahan baku dan pasar.

2.2.3.1 Landasan Hukum Penggunaan Potensi Daerah

Pemerintah daerah menurut ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia yang didasarkan pada sistem desentralisasi. Otonomi daerah sendiri memiliki hak, wewenang dan kewajiban

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan, kemampuan serta kebutuhan daerah tersebut.

Ada juga ketentuan pada keuangan daerah dari potensi yang dimiliki. Keuangan daerah adalah semua hak kewajiban daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. (pasal 1 butir 55 PP No. 58 Tahun 2005). Menurut peraturan pemerintah Nomor 105 tahun 2000, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Dalam peraturan perundang-undangan, sumber pendapatan daerah sendiri terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- 2) Dana Perimbangan
- 3) Pendapatan Lain-Lain

Adapun pengukuran potensi daerah menggunakan data pertumbuhan ekonomi berdasarkan angka dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kriteria di bawah ini:

- a. Geografis, meliputi sumber daya alam dan persebarannya
- b. Demografi, meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan
- c. Ekonomi, aktifitas perekonomian (PDRB), Pertumbuhan ekonomi

2.2.3.2 Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang dengan nyata atau potensial dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau dengan perkataan lain sumber daya alam merupakan semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam, yang dipakai untuk memenuhi segala kepentingan hidupnya (Katioi, 1983). Keberadaan sumber daya alam dengan segala potensi yang terkandung didalamnya tidak lepas dengan apa yang disebut ekosistem. Ekosistem dapat diibaratkan

sebagai suatu kerajaan, yang didalamnya terdapat hubungan erat saling ketergantungan satu sama lain, yang merupakan suatu tatanan dari unsur-unsur lingkungan hidup sebagai suatu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup (UULH, 1997).

Berdasarkan lokasinya, sumber daya alam terdiri dari: sumber daya alam terestrial (darat) dan akuatik (perairan). Sedangkan berdasarkan materinya, sumber daya alam juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam biotik (makhluk hidup: hewan dan tumbuhan) dan abiotik (benda yang mati: tanah, angin, air, dan barang tambang). Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua: (1) sumber daya yang dapat diperbarui: sumber daya alam yang dapat diproduksi kembali (air, lahan, hutan dan margasatwa). (2) sumber daya yang tidak dapat diperbarui: sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan bisa habis (batubara, freepot, foafat, minyak bumi dan batuan). Faktor produksi terdiri dari tanah (*land*), tenaga kerja (*labour*), dan modal (*capital*). Sumber daya alam berupa tanah dengan segala potensi kekayaan yang terkandung didalamnya (pertanian dalam atri luas, pertambangan, dan lainnya), aliran Physiokrat cukup besar akan menjadi bangsa (negara) yang makmur atau dan maju. (Budianto, 2010).

Kabupaten Bojonegoro berada diwilayah terestrial dengan kekayaan sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam air, sumber daya alam hutan, dan sumber daya alam mineral atau migas(Suryaningsum, 2015). Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki potensi migas sangat besar. Sumber daya alam tersebut mempunyai peran dan kedudukan masing-masing sesuai dengan letak dan fungsinya. Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan minyak dan gas bumi di kabupaten Bojonegoro. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia yang khusus mengatur tentang Minyak dan gas bumi terdapat dalam UU RI No. 22 tahun 2001.

Buku Michael P. Todaro (2009) menyatakan mata pencaharian berbasis sumber daya alam sebagai ajalan keluar dari kemiskinan. Melalui pendekatan dari sektor lingkungan ini, beserta pengumpulan bahan makanan, dan kegiatan sejenisnya,

sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan, Dengan hal tersebut, alokasi sumber daya daerah akan efektif dan terarah sehingga keunggulan daerah dapat dibangun.

2.2.3.3 Sumber Daya Manusia

Menurut Schult (1995) dalam penelitian Wawan Sujarwo (2010) Sumber daya manusia hendaknya tidak hanya dilibatkan sebagai obyek (penikmat) hasil pembangunan tetapi sekaligus sebagai subyek (pelaku) pembangunan. Dalam bahasa ekonomi kependudukan, bonus demografi dimaknai sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh semakin besarnya jumlah tabungan dari penduduk yang produktif. Hal ini dapat memacu tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut sering disebut dengan istilah jendela kesempatan (*Window of Opportunity*) bagi suatu negara untuk melakukan akselerasi ekonomi dengan menggenjot berbagai keterampilan melalui pendidikan karena banyaknya angkatan kerja.

Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktifitas, tetapi juga akan berpengaruh pada kemampuan masyarakat. Pendidikan bisa menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu negara. Para ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari pada kapasitas produk tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah *investment in human capital* (Schultz, 1981).

Studi tentang investasi sumber daya manusia telah dilakukan oleh Schultz (1961), menyatakan bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk keluar dari perbudakan. Pendidikan tidak dapat terlepas dari

masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Alhumami (2014), menyatakan pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

Investasi pada modal insani (*Human Capital Investment*) yang dapat memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dan akan mempunyai pengaruh yang sama bahkan lebih besar terhadap kapasitas produksi. Selain sekolah formal ada pula pelatihan-pelatihan untuk tingkat lanjutan bagi tenaga pendidik dan juga adanya buku-buku pembelajaran ekonomi yang relevan dengan perubahan zaman yang dapat membawa perubahan cukup besar terhadap kualitas dan produktivitas tenaga yang ada. Oleh karena itu, investasi pada modal manusia ini sama halnya dengan memperbaiki kualitas sekaligus meningkatkan produktivitas sumberdaya-sumberdaya yang ada melalui investasi yang strategis tersebut.

2.2.3.4 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Dalam ekonomika makro, pengertian PDB terbagi menjadi dua dalam buku Sukirno (2013): pertama, yaitu seluruh pengeluaran untuk barang jadi dan jasa yang diproduksi dalam negeri, atau seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh pemilik faktor produksi dalam negeri.

Kedua, yaitu terjadinya pertumbuhan/perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses kerja antara pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut

(Arsyad, 2010). Tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor (Kuncoro, 2006).

2.2.4 Kemiskinan

Arsyad (2010) menyatakan pada dasarnya kemiskinan merupakan suatu standart tingkat kehidupan yang rendah, yaitu ditandai dengan adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sekelompok atau sejumlah orang yang dibandingkan dengan standart kehidupan yang berlaku di masyarakat yang langsung bersangkutan. Standart kehidupan yang rendah tersebut sangat tampak pengaruhnya terhadap keadaan kesehatan moral, kesehatan, pendidikan serta rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin yang serba kekurangan akan kebutuhan pokok. Masyarakat miskin selalu berada pada kondisi ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar yang menimbulkan perilaku dan mentalitas miskin.

Menurut Widodo (1997) menjelaskan bahwa konsep kebutuhan dasar selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan umat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya yang tidak berpenghasilan cukup, bahkan yang tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin umumnya mempunyai ciri mengenai lemah dalam bidang kemampuan berusaha serta keterbatasan akses pada kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan tertinggal dari masyarakat lainnya. Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang dibutuhkan oleh setiap orang agar bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi yang cukup dengan nilai kalori dan protein yang sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya serta sandang, papan terutama pangan.

2.2.4.1 Faktor-Faktor Kemiskinan

Kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat, ternyata kemiskinan juga berkaitan dengan kepemilikan atas faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat, serta berkaitan dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan (Arsyad, 2010).

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2006) antara lain :

- a. Secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.
- c. Miskin muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.

Selanjutnya faktor-faktor kemiskinan ditinjau dari keadaan sosial budaya seperti yang dikemukakan oleh Kusnaedi (1995) antara lain :

- a. Adat-istiadat

Keterikatan terhadap pola-pola tradisional dari ikatan adat yang kuat seringkali menghambat dalam pembaharuan kearah yang lebih maju sehingga tertinggal oleh daerah lain yang lebih respon terhadap teknologi.

- b. Pengeluaran dan keterampilan masyarakat

Faktor ini terkait dengan faktor diatas. Akibat keterisolasian dan keterkaitan pada pola tradisional menyebabkan rendahnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tersebut sehingga ketinggalan.

- c. Situasi politik dan kebijaksanaan penguasa

Kebijaksanaan ini menyangkut pengalokasian anggaran yang tidak seimbang antara satu kawasan dengan kawasan lainnya dan strategi pembangunan yang timpang antara pertumbuhan ekonomi dengan pemerataannya, selain itu dapat diakibatkan oleh kebijaksanaan yang tidak berpihak pada perlindungan terhadap rakyat lemah dari desakan industrialisasi yang kapitalis.

Ginanjari Karasasmita (1996) mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan mempunyai empat penyebab utama yaitu:

- a. Rendahnya taraf pendidikan. Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan untuk dimasuki. Dalam bersaing mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan juga menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
- b. Rendahnya tingkat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikiran dan prakarsa.
- c. Terbatasnya lapangan kerja. Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.
- d. Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

2.2.4.2 Macam-Macam Kemiskinan

Syahrir (1986) dalam proses pembangunan suatu negara ada tiga macam kemiskinan antara lain:

- a. Miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya.
- b. Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi ditengah-tengah kelimpahan, kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan sistem yang berlaku.
- c. Kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya pendistribusian produk nasional total.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut, sehingga mereka tidak dapat

ikut menikmati sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Sumardjan, 1980) dalam buku Arsyad (2010).

Menurut Arsyad (2010) kemiskinan dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Kemiskinan absolut : kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Apabila dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum dengan pendapatan yang diterimanya maka dia dikatakan miskin.
- b. Kemiskinan relatif : kemiskinan ini disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan. Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan pendapatan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin.

2.2.4.3 Kriteria Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makan dan bukan makan (BPS, 2018). Untuk kebutuhan makan digunakan patokan 2.100 kalori per hari. Sedang pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. BPS menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) dan pendekatan *Head Count Index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasi sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan *Head Count Index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut.

Penggunaan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*) mempunyai tiga kelemahan utama (Kuncoro, 2006). Kelemahan pertama berkaitan dengan konsep, dimana kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan hanya diukur dari sisi pengeluaran per kapita. Kelemahan kedua, dari segi metodologi pengukuran standar kebutuhan minimum.

Metode BPS dikritik karena kurang memperhatikan garis kemiskinan antar daerah perkotaan dan pedesaan yang digunakan dalam metode BPS kurang mempresentasikan perbedaan hidup riil antara daerah perkotaan dan pedesaan. Permasalahan yang ketiga, masih adanya perdebatan tentang pengukuran nilai standar minimum. Apakah pengukurannya harus didasarkan pada harga-harga yang sebenarnya dibayar oleh penduduk miskin ataukah harga-harga yang sebenarnya dibayar oleh penduduk yang hidup sedikit.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan yang dipakai adalah nominal yang ditetapkan oleh BPS Kabupaten Bojonegoro yaitu Rp. 251.323,00/kapita/bulan. Rumah tangga dengan pendapatan per kapita/bulan kurang dari tetapan tersebut digolongkan miskin.

Hasibuan (2002) mengemukakan bahwa kriteria pendapatan yang ditetapkan dalam standar pendapatan nasional dan salah satu tolak ukur tingkatan pendapatan terhadap kemiskinan dibagi dalam kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria untuk pendapatan rendah
 - a. Pendapatan rendah yaitu Rp 1.000.000-Rp 10.000.000 pertahun atau rata-rata Rp 750.000 perkapita perbulan.
 - b. Tidak memiliki pekerjaan tetap
 - c. Tidak memiliki tempat tinggal tetap (sewa)
 - d. Tingkat pendidikan yang terbatas
2. Kriteria untuk pendapatan sedang
 - a. Pendapatan sedang yaitu Rp 10.000.000-Rp 25.000.000 atau rata-rata Rp1.250.000 perkapita perbulan
 - b. Memiliki pekerjaan tetap
 - c. Memiliki tempat tinggal sederhana
 - d. Memiliki tingkat pendapatan tinggi
3. Kriteria untuk pendapatan tinggi

- a. Pendapatan tinggi yaitu Rp 25.000.000-Rp 50.000.000 atau rata-rata Rp2.083.333 perkapita perbulan
- b. Memiliki lahan dan lapangan kerja
- c. Memiliki pekerjaan tetap
- d. Memiliki tingkat pendidikan.

2.2.4.4 Mengukur Tingkat Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2010) garis kemiskinan adalah semua ukuran kemiskinan yang dipertimbangkan berdasarkan norma-norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada tingkat konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas dua elemen yaitu :

- 1. Pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi standar bizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya dan
- 2. Jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Secara umum, saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat (Kecuk Suharyanto, 2011). Dengan konsep ini, penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (Suhariyanto, 2011). Dalam terapanya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang mempunyai rata-rata pengeluaran atau pendapatan perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Perhitungan penduduk miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan sensus, sehingga hasilnya hanyalah estimasi. Data yang dihasilkan disebut data kemiskinan makro. Di Indonesia sumber data yang digunakan adalah survei Sosial Ekonomi Nasional.

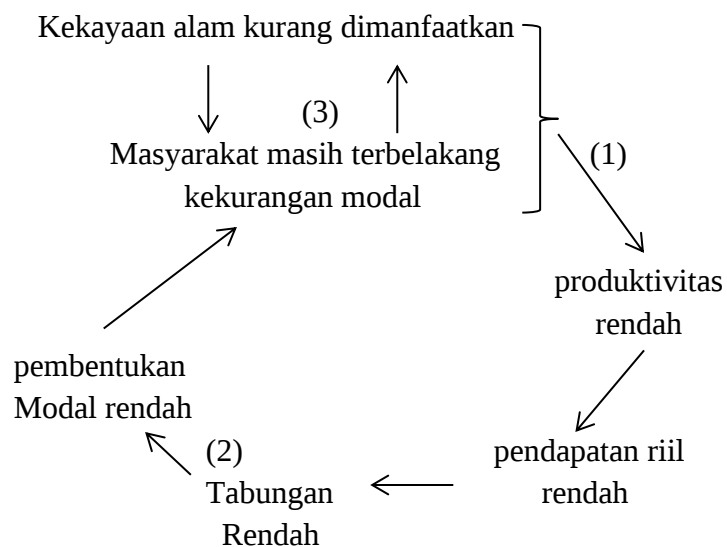
2.2.4.5 Konsep Lingkar Kemiskinan (*vicious circle of poverty*)

Menurut Nurkse (2010) lingkaran kemiskinan didefinisikan sebagai suatu rangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi di mana sebuah negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih

tinggi. Karena kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan masa lalu, tetapi kemiskinan juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan di masa mendatang.

Meier & Baldwin (1957) dalam buku Arsyad (2010) mengemukakan suatu konsep lingkaran kemiskinan timbul dari hubungan yang saling mempengaruhi antara kondisi masyarakat yang masih terbelakang (tradisional) dan kekayaan alam yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Pengembangan kekayaan alam yang dimiliki, dalam suatu masyarakat harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Kekayaan alam belum sepenuhnya diusahakan dan dikembangkan karena tiga alasan yaitu : (1) tingkat pendidikan masyarakatnya yang relatif rendah, (2) kurangnya tenaga ahli yang diperlakukan, dan (3) terbatasnya mobilitas dari sumber daya yang ada. Ketiga lingkaran kemiskinan tersebut dapat dilukiskan pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Lingkar Kemiskinan



Kesimpulan pada hakikatnya konsep lingkaran kemiskinan menganggap bahwa : (1) ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup, (2) kurangnya faktor pendorong untuk kegiatan penanaman modal, dan (3) tingkat pendidikan dan keahlian masyarakat yang relatif lebih rendah, merupakan tiga faktor utama yang menghambat proses pembentukan modal dan pembangunan ekonomi khususnya di negara sedang berkembang.

2.3.6 Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Terdapat dua kategori penduduk miskin yang menjadi masalah dalam konsep kemiskinan, yaitu kategori miskin kronis dan miskin transisi mendekati kronis. Permasalahan miskin transisi Hulme dan Shepherd (2013) memberikan saran agar pemerintah melakukan transisi kebijakan jangka pendek yang dianggap sudah mencukupi untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan. Kebijakan jangka pendek ini bisa dalam bentuk perluasan kesempatan secara instan seperti memberikan bantuan modal atau pembukaan lapangan kerja baru oleh pemerintah. Asumsinya, penduduk yang dikategorikan sebagai miskin transisi mampu mengambil kesempatan ini, memperbaiki diri dan mampu meningkatkan levelnya secara mandiri.

Kebijakan pengentasan kemiskinan bagi penduduk yang berada di level kemiskinan kronis lebih sulit dari pada pengentasan kemiskinan bagi penduduk di level transient. Penduduk miskin kronis relatif membutuhkan kebijakan yang lebih panjang dan mahal untuk menanggulangnya (Hulme dan Shepherd, 2013). Kebijakan tersebut diambil dikarenakan, asumsinya orang miskin kronis dianggap tidak mampu menangkap dan memanfaatkan kesempatan melalui kebijakan instan seperti pada miskin transisi. Kebijakan kemiskinan kronis ini biasanya meliputi perbaikan struktural seperti peningkatan kualitas infrastruktur publik, menaikkan level pendidikan dan kesehatan. Harapannya mereka mampu meraih kesempatan yang diberikan melalui kebijakan instan seperti pada kebijakan miskin transisi.

Buku Arsyad (2010) juga memberikan pandangan mengenai kebijakan pengentasan kemiskinan melalui:

(1) Pengembangan sumber daya manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk. Perluasan ruang lingkup dan kualitas dari pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi pada modal manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut. pada waktu yang bersamaan,

pelayanan-pelayanan tersebut secara tidak langsung mampu memuaskan konsumen atas kebutuhan pokok.

(2) Pembangunan Pertanian Pedesaan

Penduduk Indonesia mayoritas bekerja di sektor pertanian, pada saat yang sama justru tercatat sebagai salah satu negara pengimpor beras terbesar di dunia. Realita ini melahirkan tekad untuk memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, sebagai sektor yang diharapkan menjadi *Leader* dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan.

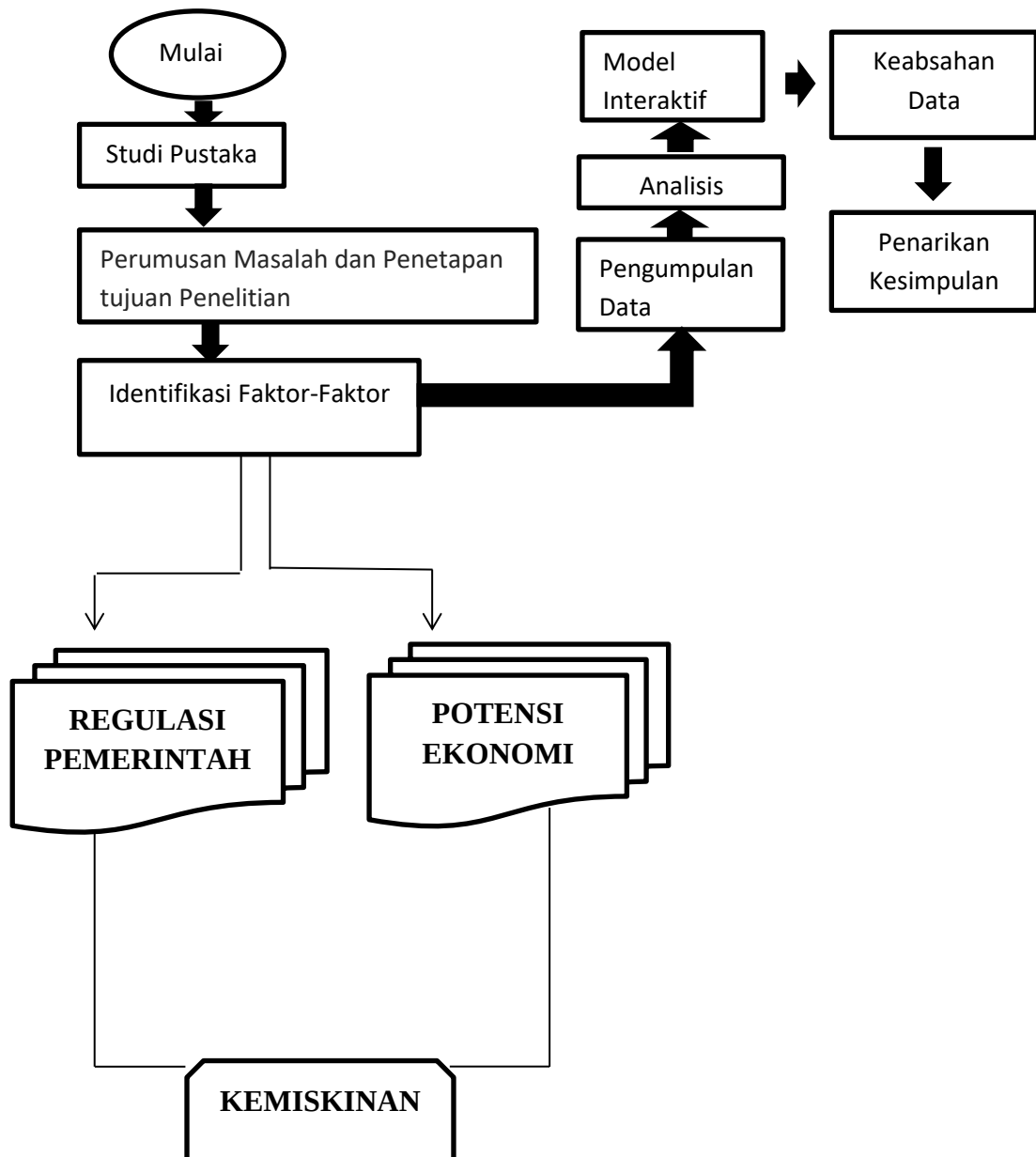
(3) Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM-LSM dapat memainkan peran yang lebih besar di dalam perencanaan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena fleksibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang mereka bina, LSM-LSM ini untuk beberapa hal mereka mampu menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif dari pada program-program pemerintah.

Adapun program Pembangunan Daerah yang mempunyai fokus dalam pengentasan Kemiskinan yang terlampir dalam RPJP dan RPJMD kabupaten Bojonegoro pada tahun 2013-2018. Dalam dokumen tersebut terdapat program atau urusan yang menjadi wajib dan pilihan sebagai upaya atau strategi dalam pencapaian visi kabupaten Bojonegoro di tahun 2025. Dalam mengatasi tantangan pembangunan dan meraih peluang diperlukan suatu perencanaan yang terarah dan komprehensif yang meliputi pilar pembangunan ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan hidup, pilar keberlanjutan budgeting, pilar good and clear governance dan pilar good leadership sustainability untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Ada juga peraturan daerah kabupaten Bojonegoro yang khusus dalam menangani penanggulangan kemiskinan yaitu pada Perda Kabupaten Bojonegoro No. 6 tahun 2015.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dengan rentang waktu 2018 hingga 2022. Data sekunder tersebut diperoleh dari lembaga resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Data-data dalam penelitian ini yaitu Tingkat kemiskinan (TK), Potensi Ekonomi (PE) yang diukur dari Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan dengan hitungan *Location Quotien* (LQ), sedangkan permasalahan sosial menggunakan Teknik *Clustering*.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro, salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Penentuan lokasi ditentukan oleh peneliti secara purposive yaitu dengan pertimbangan tertentu termasuk sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

3.3 Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), dan model analisis regresi linier berganda data panel atau lebih umum disebut dengan analisis regresi data panel dengan menggunakan software *Microsoft Excel* dan *Eviews 12* pada saat pengolahan data.

3.3.1 Location Quotient (LQ)

Proses menentukan sektor basis dan non basis di 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur digunakan metode analisis *Location Quotien* (LQ) dengan menentukan 5 nilai tertinggi kemudian di rata-ratakan. Metode ini merupakan suatu model yang bisa membantu menunjukkan keunggulan ekspor perekonomian di suatu daerah atau derajat *self sufficiency* di suatu sektor. Pada metode ini, kegiatan ekonomi di suatu daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegiatan sektor basis merupakan kegiatan ekonomi yang mampu melayani kebutuhan pada wilayah itu sendiri maupun yang ada di luar daerah yang bersangkutan.
2. Kegiatan nonbasis merupakan kegiatan yang hanya mampu melayani kebutuhan di daerah itu sendiri bahkan belum mencakup daerahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan bantuan dari daerah atau sektor yang lain (Soebagiyo & Hascaryo, 2015).

Data yang digunakan dalam penelitian ini untuk selanjutnya di analisis LQ ialah data PDRB berdasarkan harga konstan. Metode LQ juga merupakan perbandingan total pendapatan suatu sektor di suatu daerah dengan daerah yang lebih luas. Sehingga, untuk mengidentifikasi sektor basis dan nonbasis pada perekonomian, dapat digunakan rumus seperti berikut (Budiharsono, 2001).

$$LQ = \frac{S_i/N_i}{S/N} = \frac{S_i/S}{E_i/N} \dots\dots\dots (3.1)$$

Keterangan:

- LQ = Besarnya kuosien lokasi suatu sektor ekonomi.
 S_i = Jumlah pendapatan sektor i pada tingkat kabupaten
 S = Jumlah total pendapatan sektor perekonomian di tingkat kabupaten.
 N_i = Jumlah Pendapatan sektor i pada tingkat provinsi (wilayah atas).
 N = Jumlah total pendapatan sektor perekonomian di tingkat provinsi.

Berdasarkan perhitungan tersebut, apabila nilai dari LQ lebih dari satu, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sehingga, mampu memenuhi kebutuhan perekonomian pada wilayahnya dan sektor itu lebih berorientasi ke ekspor. Jika perhitungan memperlihatkan LQ kurang dari satu, maka sektor tersebut merupakan sektor nonbasis. Jadi, sektor tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pada wilayah tersebut sehingga memerlukan bantuan dari sektor lain. Sektor non basis dapat digolongkan pada sektor yang berorientasi pada impor.

3.3.2 Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ)

Adapun tahapan untuk melengkapi metode LQ, digunakan analisis *Dynamic Location Quotient*. Dengan menggunakan metode ini kita mampu mengetahui

peran dari sektor prioritas, karena bisa memberikan hasil yang lebih akurat dengan mengacu pada laju pertumbuhan sektor ekonomi. Menurut Ardian et al., (2021), formula dari DLQ adalah sebagai berikut:

$$DLQ = \frac{(1+G_{in})/(1+G_n)}{(1+G_i)/(1+G)} t \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan:

DLQ = Indeks dari laju pertumbuhan sektor i di kabupaten / kota

G_{in} = Rata - rata laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi i di kabupaten / kota

G_i = Rata - rata laju pertumbuhan PDRB sektor ekonomi i di provinsi Jawa Timur

G_n = Rata - rata laju pertumbuhan PDRB di kabupaten / kota

G = Rata - rata laju pertumbuhan PDRB di provinsi provinsi Jawa Timur

T = Jangka waktu pertumbuhan DLQ

Kriteria yang digunakan antara lain:

- Apabila $DLQ > 1$, maka laju pertumbuhan sektor i terhadap PDRB daerah masih mampu diharapkan menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.
- Apabila $DLQ < 1$, maka laju pertumbuhan sektor i terhadap PDRB daerah tidak mampu diharapkan menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.
- Apabila $DLQ = 1$, maka pertumbuhan sektor i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah sebanding.

Adapun Analisis Gabungan SLQ dan DLQ Dengan menggunakan analisis ini, kita dapat mengetahui sektor-sektor unggulan di masing-masing kabupaten dan juga pembagiannya seperti pada Tabel 3.1

Tabel 1.1 Kriteria pada analisis SLQ dan DLQ

Kriteria	DLQ > 1	DLQ < 1
SLQ > 1	Unggulan	Prospektif
SLQ < 1	Andalan	Tertinggal

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sektor unggulan dengan kriteria $DLQ > 1$ dan $SLQ > 1$. Apabila sudah mencapai kriteria tersebut, maka sektor itu termasuk dalam golongan sektor unggulan. Artinya bahwa sektor tersebut akan tetap unggul untuk beberapa tahun ke depan. Sementara itu sektor

andalan memiliki kriteria $DLQ < 1$ dan $SLQ > 1$ sehingga, sektor ini masih belum unggul namun untuk tahun-tahun ke depannya berpotensi unggul. Kemudian sektor prospektif yang memiliki kriteria $DLQ < 1$ dan $SLQ > 1$ merupakan sektor unggulan saat ini namun tidak berpotensi unggul untuk tahun-tahun berikutnya. Sektor tertinggal memiliki kriteria $DLQ < 1$ dan $SLQ < 1$. Sektor yang tidak unggul untuk saat ini dan di tahun-tahun berikutnya belum mampu berpotensi untuk unggul (Hanani, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah di Provinsi Jawa Timur yang secara orientasi berada dibagian paling barat wilayah provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah tepatnya di kabupaten Blora. Secara astronomis kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi 112°25' - 112°09' Bujur Timur dan 6°59' -7°37' Lintang Selatan, dengan jarak kurang lebih 110 km dari ibu kota Provinsi. Luas wilayah kabupaten Bojonegoro sebesar 2.307,06 km² atau 4,78 persen dailies Provinsi Jawa Timur.

Secara geografis, kabupaten Bojonegoro memiliki dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- A. Sebelah Selatan kabupaten Madiun, Nganjuk dan Ngawi,
- B. Sebelah Timur Kabupaten Lamongan,
- C. Sebelah Utara Kabupaten Tuban, dan
- D. Sebelah Barat Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Bojonegoro sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pertanian maka dalam konsep pengembangan perlu memperhatikan tentang ketersediaan lahan, letak geografis, jenis tanah, agroklimat, sumber daya wilayah, sarana dan prasarana. Sumber daya dan kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh terhadap perkembangan dan prospek terhadap perkembangan pembangunan wilayah.

Penggunaan lahan di kabupaten Bojonegoro terdiri dari kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Berdasarkan data yang dibagikan oleh Badan Pusat Statistik kabupaten Bojonegoro dalam penggunaan lahan hingga tahun 2018 di dominasi oleh guna lahan hutan yaitu seluas 93.833,36 Ha, sawah se;uas 95.935 Ha, tanah kering 48.932 Ha, sempadan sungai dan waduk seluas 2.209 Ha dan lain-lain seluas 6.779 Ha. Pada pemanfaatan lahan sering terjadi perubahan tata guna lahan yang di sebabkan oleh proses perkembangan wilayah dan kebutuhan pergerakan masyarakat. Tutupan lahan atau penggunaan lahan merupakan salah

satu unsur indikator yang berpengaruh terhadap laju perkembangan pembangunan di suatu wilayah.

Sesuai dengan letak geografis, Kabupaten Bojonegoro sebagai daerah yang beriklim tropis terdiri atas dua musim yaitu *musim kemarau* (April - Oktober) dan *musim hujan* (November - Maret). Kondisi hidrologi di kabupaten Bojonegoro dijelaskan berdasarkan sumber air yang terdapat di kabupaten Bojonegoro yaitu air sungai, mata air, air tanah. Selain itu jenis sumber daya alam di atas juga terdapat sumber daya alam air yang telah dimanfaatkan dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan waduk dan saluran irigasi. Jenis tanah di kabupaten Bojonegoro terdiri dari alluvial, gromosol, litosol dan medeteran.

Berdasarkan keadaan topografi, kabupaten Bojonegoro didominasi oleh keadaan tanah yang berbukit yang berada di sebelah selatan (pegunungan kapur selatan) dan sebelah utara (pegunungan kapur utara) yang mengapit dataran rendah yang berada di sepanjang aliran Bengawan Solo yang merupakan daerah pertanian yang subur. Menurut Van Bemmelen (1949) dalam dokumen RPJM kabupaten Bojonegoro mengatakan, pegunungan kendeng dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian barat yang terletak di antara Gunung Ungaran dan Solo (Sebelah Utara Ngawi), bagian tengah yang membentang hingga jombang hingga Delta Sungai Brantas dan menerus ke Teluk Madura, Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam Zona Kendeng bagian barat.

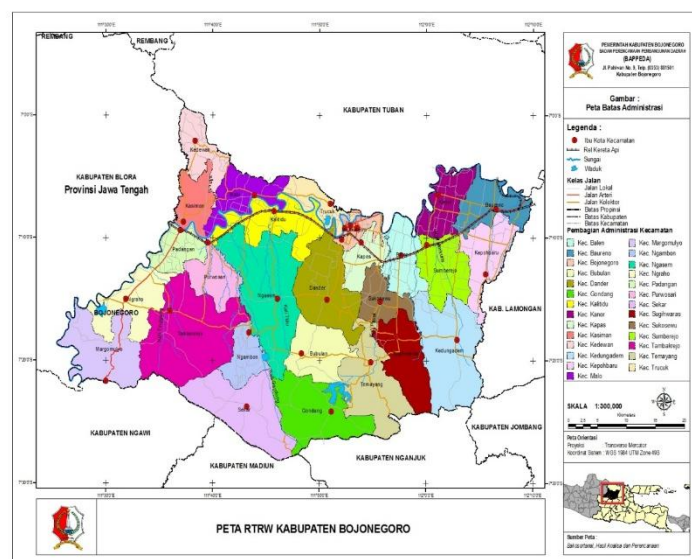
Permukaan tanah di kabupaten Bojonegoro memiliki ketinggian dikisarkan antara 18 meter sampai dengan 523 meter diatas permukaan laut. Sebagian besar wilayah di kabupaten Bojonegoro berada pada ketinggian antara 25-99,00 meter (45,35%), kemudian pada ketinggian antara 100-499,99 meter (35,69%). Sisanya adalah dataran <25 meter (18,71%) dan pegunungan >500 meter (0,25%. Ketinggian tempat diatas permukaan laut juga menjadi faktor yang menentukan perubahan iklim suatu wilayah, sehingga sangat berpengaruh terhadap usaha-usaha dibidang pertanian.

Berdasarkan pendekatan ekologi pada sistem lingkungan alam termasuk peranan manusia didalamnya, di kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa satuan lingkungan dengan ekologi tetentu, yaitu:

- A. Daerah sungai Bengawan Solo yang mengalir dari selatan, menjadi batas alam dari Provinsi Jawa Tengah, kemudian mengalir ke arah Timur, di sepanjang wilayah utara kabupaten Bojonegoro.
- B. Bagian selatan adalah pegunungan kapur, bagian dari rangkaian gunung ken-deng. Bagian barat laut (berbatasan dengan jawa tengah) adalah bagian dari rangkaian pegunungan kapur utara.

Secara administratif kabupaten Bojonegoro dengan luas wilayah mencapai 2.307,06 km², terbagi menjadi 28 Kecamatan terdiri dari 419 desa dan 11 kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Margomulyo, Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Sekar, Bubulan, Gondang, Temayang, Sugihwaras, Kedungadem, Kepohbaru, Baureno, Kanor, Sumberejo, Balen, Sukosewu, Kapas, Bojonegoro, Trucuk, Dander, Ngasem, Gayam, Kalitidu, Malo, Purwosari, Padangan, Kasiman dan Kedewan. Wilayah terluas di kabupaten Bojonegoro adalah kecamatan Tambakrejo yaitu mencapai 20,952 Ha atau sekitar 9,08 % dari luas wilayah kecamatan di kabupaten Bojonegoro.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bojonegoro

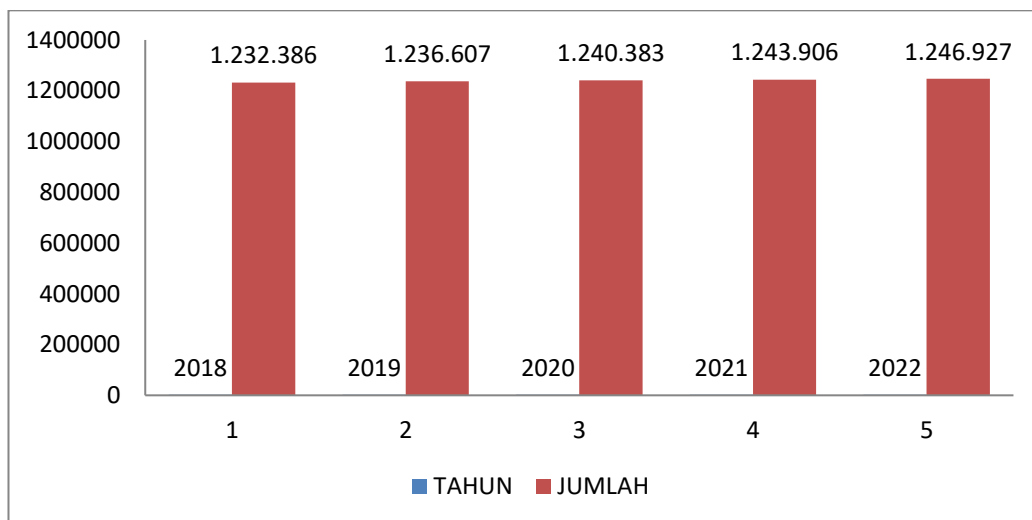


Sumber : BAPPEDA Kab. BOJONEGORO, 2023

4.1.2 Demografi Kabupaten Bojonegoro

Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Jumlah penduduk kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 mencapai 1.246.927 Jiwa. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,24 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk kabupaten Bojonegoro pada tahun 2017 yang tercatat berjumlah 1.243.906 jiwa. Angka kepadatan penduduk kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018 kurang lebih sebesar 540 jiwa/km², angka ini meningkat jika dibandingkan angka kepadatan penduduk tahun 2017 yaitu kurang lebih 539 jiwa/km².

Gambar 4.2
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2018-2022



Sumber : BAPEDA, Kab. Bojonegoro, 2022

Kepadatan penduduk tertinggi di kabupaten Bojonegoro untuk tahun 2022 terdapat di wilayah kecamatan Bojonegoro dengan kepadatan Penduduk sebanyak kurang lebih 3.327 jiwa/km² menurun dibandingkan tahun 2021 dengan angka kepadatan kurang lebih 3.456 jiwa/km², sedangkan kecamatan Margomulyo merupakan wilayah dengan kepadatan terendah yaitu sebesar kurang lebih 164 jiwa/km² pada tahun 2017 dan pada tahun 2022 kepadatannya turun menjadi sebesar kurang lebih 162 jiwa/km².

Tabel 4.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bojonegoro
menurut Kecamatan, Tahun 2021 dan 2022

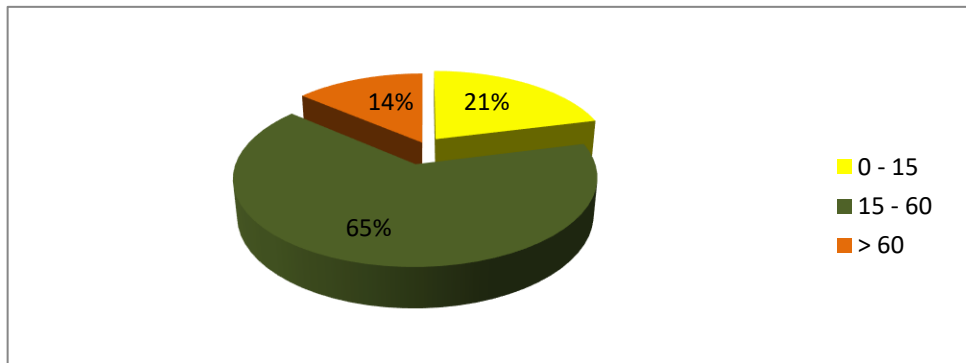
No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Tahun 2021		Tahun 2022	
			Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan (Jiwa/km ²)
01	Margomulyo	139,68	22.961	164,38	22.642	162,10
02	Ngraho	71,48	42.287	591,59	42.720	597,10
03	Tambakrejo	209,52	52.441	250,29	52.931	252,63
04	Ngambon	48,65	11.057	227,28	11.312	232,52
05	Sekar	130,24	26.497	203,45	26.536	203,75
06	Bubulan	84,73	13.750	162,28	14.072	166,08
07	Gondang	107,01	24.408	228,09	24.519	229,15
08	Temayang	124,67	34.460	276,41	34.941	280,27
09	Sugihwaras	87,15	43.154	495,17	44.184	508,99
10	Kedungadem	145,15	77.378	533,09	79.134	545,19
11	Kepohbaru	79,64	60.219	756,14	61.583	773,27
12	Baureno	66,37	75.532	1.138,94	75.952	1.144,37
13	Kanor	59,78	53.964	902,71	55.450	927,57
14	Sumberejo	76,58	67.484	881,22	68.701	897,11
15	Balen	60,52	63.277	1.045,56	63.610	1.051,06
16	Sukosewu	47,48	40.665	856,47	40.771	858,70
17	Kapas	46,38	53.992	1.164,12	51.499	1.110,37
18	Bojonegoro	25,71	88.854	3.456,01	85.543	3.327,23
19	Trucuk	36,71	36.538	995,31	36.727	1.000,46
20	Dander	118,36	80.418	679,44	78.431	662,65
21	Ngasem	147,21	57.592	391,22	57.872	393,13
22	Gayam	50,05	31.255	624,48	30.961	618,60
23	Kalitidu	65,95	47.874	725,91	47.273	716,80
24	Malo	65,41	28.547	436,43	29.257	447,29
25	Purwosari	62,32	27.203	436,51	27.877	447,32
26	Kasiman	42,00	40.953	975,07	41.448	986,86
27	Padangan	51,80	28.900	557,92	29.088	561,54
28	Kedewan	56,51	12.246	216,71	11.893	210,46
Jumlah		2.307,06	1.243.906	539,17	1.246.927	540,49

Sumber : BPS – data diolah

Pada akhir tahun 2023, jumlah penduduk kabupaten Bojonegoro yang berjumlah 1.246.926 jiwa terdiri dari 616.596 jiwa laki-laki dan 603.311 jiwa

perempuan, sehingga memiliki angka rasio seks sebesar 97,82 yang berarti bahwa dari 100 penduduk perempuan terdapat kurang lebih 98 penduduk laki-laki.

Gambar 4.3
Persentase Penduduk Kabupaten Bojonegoro,
berdasar sebaran Kelompok Usia Tahun 2022



Sumber : Publikasi BPS – Data diolah

Berdasarkan komposisi usia, penduduk kabupaten Bojonegoro pada akhir tahun 2022 lebih banyak berusia produktif yaitu berada di usia 15-60 tahun sebanyak 811.580 jiwa atau sebesar 65,09 persen. Sementara untuk kelompok usia tidak produktif (usia <15 tahun dan usia di atas 60 tahun) sebanyak 435.347 jiwa atau 34,91 persen.

4.1.3 Visi Misi Kabupaten Bojonegoro

Visi Kabupaten Bojonegoro yang tertulis dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sampai dengan tahun 2025 adalah: “Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Dan Berkelanjutan”. Adapun Misi yang menunjukkan beberapa upaya atau strategi utama pembangunan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Dalam menterjemahkan visi jangka panjang Bojonegoro, ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan berbasis ekonomi kerakyatan dan keunggulan daerah;
2. Meningkatkan kualitas hidup, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat;
3. Memantapkan pengelolaan sarana prasarana, sumberdayaalam, infrastruktur, dan industri jasa yang berkualitas;

4. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang bersih dan nyaman;
5. Meningkatkan modal sosial masyarakat guna menopang daya tahan, keamanan ketertiban dan kebahagiaan masyarakat yang kondusif serta menjaga kehidupan bernegara yang demokratis;
6. Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

4.2 Hasil Analisa

Penggunaan pendekatan LQ dari Kabupaten Bojonegoro di provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022 untuk menganalisa potensi ekonomi. Kemudian dikarakterisasi menggunakan metode DLQ sehingga diketahui sifat dari sektor-sektor perekonomian di kabupaten Bojonegoro. Adapun penggunaan teknik clustering sebagai alat analisa penentuan permasalahan sosial di kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022.

4.2.1 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Metode analisis yang digunakan untuk identifikasi sektor potensial ekonomi unggulan Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur adalah metode analisis *Location Quotient* (LQ). Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya analisis ini digunakan untuk mengukur basis ekonomi. Jika nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut menjadi basis atau merupakan sektor unggulan atau potensial, produksi yang dihasilkan tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat di ekspor keluar wilayah. Semakin nilai LQ lebih tinggi dari satu, semakin tinggi keunggulan komparatifnya (Cahyono, 2014 dalam (Pipit et al., 2020)). Sebaliknya jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan atau non potensial, produksi sektor tersebut disuatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar. Jika nilai $LQ = 1$, sektor tersebut tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan, produksi dari sektor tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk di ekspor.

Tabel 5. 1 Hasil Perhitungan Sektor dengan nilai LQ tertinggi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Sektor dengan nilai LQ tertinggi							
No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Pertambangan dan Penggalian	11,19	11,71	11,91	11,54	11,58	11,59
2	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,30	1,28	1,25	1,37	1,39	1,32
3	Informasi dan Komunikasi	0,97	0,97	0,94	1,10	1,08	1,01
4	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	0,85	0,83	0,90	1,12	0,91
5	Konstruksi	0,61	0,62	0,61	0,70	0,69	0,64

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) terhadap 17 sektor perekonomian pada data PDRB Kabupaten Bojonegoro atas dasar harga konstan tahun 2018-2022 ditemukan nilai hasil LQ lima tertinggi dari sektor-sektor tersebut yang meliputi: pertama diperoleh sektor Pertambangan dan Penggalian mempunyai nilai LQ sebesar 11,59, lalu sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib memiliki nilai LQ sebesar 1,32, lanjut sektor Informasi dan Komunikasi memiliki nilai LQ sebesar 1,01, kemudian sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai LQ sebesar 0,91 dan posisi kelima ditempati oleh sektor Konstruksi dengan nilai LQ sebesar 0,64.

4.2.2 Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Metode *Location Quotient* (LQ) mempunyai kelemahan yang harus diatasi, kelemahan LQ yaitu analisisnya yang bersifat statis sehingga tidak dapat memunculkan kemungkinan perubahan-perubahan yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Karena sektor unggulan pada saat ini belum tentu tetap menjadi sektor unggulan di tahun yang akan datang dan begitu juga sebaliknya, maka sektor non unggulan pada saat ini kemungkinan akan berubah menjadi sektor unggulan di masa yang akan datang. Metode *Dynamic Location Quotient* (DLQ) adalah metode yang digunakan untuk mengetahui perubahan posisi sektor perekonomian dimasa yang

akan datang. Dalam artian bahwa suatu sektor yang ada pada saat ini terjadi sektor unggulan belum tentu akan menjadi sektor unggulan pada masa yang akan datang. Apabila nilai $DLQ \geq 1$, maka suatu sektor perekonomian tersebut merupakan sektor unggulan dimasa yang akan datang, sedangkan jika nilai $DLQ < 1$, maka suatu sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan dimasa yang akan datang.

Tabel 5. 2 Hasil Perhitungan Sektor dengan nilai DLQ tertinggi di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

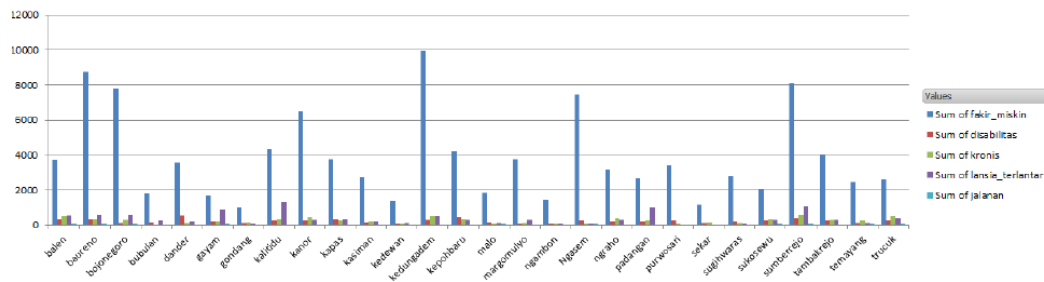
Sektor dengan nilai DLQ tertinggi		
No	Lapangan Usaha	DLQ
1.	Pertambangan dan Penggalian	210.149,4
2.	Transportasi dan Pergudangan	115.736,5
3.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.257,9
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	42.423,0
5.	Konstruksi	38.968,7

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022 ditemukan lima nilai tertinggi pertama, sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki nilai hasil DLQ sebesar 210,149.4, disusul sektor Transportasi dan Pergudangan nilai DLQ sebesar 115,736.5, kemudian sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan nilai DLQ sebesar 56,257.9, dilanjutkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai DLQ sebesar 42,423.0, dan kelima dari sektor Konstruksi dengan nilai DLQ sebesar 38,968.7.

4.2.3 Teknik *Clustering*

Clustering merupakan proses pengelompokkan suatu pola dimana pola tersebut belum memiliki label dan dilakukan tanpa adanya supervisi sehingga menjadi suatu kelompok yang mempunyai karakteristik tertentu. Clustering juga sangat penting untuk banyak hal lain, seperti analisis pola, pengambilan keputusan, penambahan data, dan lain sebagainya.



Gambar 4.1 Jumlah Jiwa pada Data PMKS Di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 4.1 diperoleh variabel fakir miskin data tertinggi pada Kecamatan Kedungadem dan data terendah pada Kecamatan Gondang. Variabel anak jalanan data tertinggi pada Kecamatan Sumberejo dan data terendah pada Kecamatan Bubulan, Dander, Gondang, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kedungadem, Kepohbaru, Margomulyo, Ngambon, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sekar, Sugihwaras, dan Tambakrejo. Variabel penyandang disabilitas data tertinggi pada Kecamatan Dander dan data terendah pada Kecamatan Ngambon. Variabel penyakit kronis data tertinggi pada Kecamatan Sumberejo dan data terendah pada Kecamatan Bubulan. Variabel lansia terlantar data tertinggi pada Kecamatan Kalitidu dan data terendah pada Kecamatan Purwosari dan Sekar. Variabel pemulung data tertinggi pada Kecamatan Sukosewu dan data terendah pada Kecamatan Bubulan, Gondang, Margomulyo, Ngambon, Sekar, dan Sugihwaras.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengelompokan PMKS pada setiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Uji validasi dapat digunakan untuk menentukan apakah kluster optimal. Penelitian ini dilakukan uji validasi dengan menerapkan pendekatan *Silhouette Coefficient*. Seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2, kualitas kluster meningkat ketika nilai indeks mendekati 1.

Tabel 4.3 Validasi Indeks Cluster

Jumlah Cluster	<i>Silhouette Coefficient</i>
2	0,7275
3	0,6660
4	0,5119
5	0,5064
6	0,4552
7	0,4948
8	0,5017
9	0,5078
10	0,5553

Sumber: Data diolah, 2024

Nilai *Silhouette Coefficient* sebesar 0,7275, nilai paling optimal berada pada jumlah *cluster* sebanyak 2. Selain itu dapat dilihat juga apakah anggota pada setiap *cluster* tersebut sudah sesuai atau belum.

Tabel 4.4 Titik Pusat Clustering

	Fakir Miskin	Anak Jalanan	Penyandang Disabilitas	Penyakit Kronis	Lansia Terlantar	Pemulung
Cluster 1	8052,911	3,323428	266,8536	356,6985	523,8826	31,22905
Cluster 2	2649,900	2,790000	200,4896	197,4554	333,5565	32,30145

Sumber : Data diolah, 2024

Melalui Tabel 4.4 didapatkan bahwa cluster 1 termasuk cluster dengan Tingkat penyebaran PMKS yang tinggi dengan tabel yang berwarna merah, sedangkan cluster 2 termasuk cluster dengan tingkat penyebaran PMKS rendah dengan tabel yang berwarna hijau.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis LQ dan DLQ, Kabupaten Bojonegoro di Provinsi Jawa Timur dengan keunggulan di masing-masing sektor berdasarkan PDRB. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang nilai tertingginya dari 17 sektor PDRB adalah pada sektor Pertambangan dan Penggalian. Oleh karena itu, perlu upaya dan memberi program khusus kepada daerah tersebut dengan memanfaatkan potensi pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berada di dataran rendah untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Serta Program peningkatan

layanan dan fasilitas pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut, agar dapat memanfaatkan potensi yang sangat baik dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ayubi (2014) dengan hasil penelitian bahwa sektor yang teridentifikasi sebagai sektor unggulan adalah sektor pertanian. Hal tersebut ditunjukkan dengan ditemukannya sektor ekonomi yang menonjol baik ditingkat Kabupaten Banyuwangi maupun provinsi Jawa Timur yaitu sektor bangunan dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi belum mampu mengatasi kemiskinan dan disebabkan juga adanya faktor lain yang turut nyata terhadap pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan Tabel penentuan titik *clustering* didapatkan bahwa cluster 1 terdiri dari Kecamatan Balen, Baureno, Bojonegoro, Kanor, Kedungadem, Ngasem, dan Sumberrejo, sedangkan cluster 2 terdiri dari Kecamatan Bubulan, Dander, Gayam, Gondang, Kalitidu, Kapas, Kasiman, Kedewan, Kepohbaru, Malo, Margomulyo, Ngambon, Ngraho, Padangan, Purwosari, Sekar, Sugihwaras, Sukosewu, Tambakrejo, Temayang, dan Trucuk.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini serta pembahasan dilengkapi uraian deskriptif, dengan ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada analisa data dalam mengidentifikasi potensi ekonomi di Kabupaten Bojonegoro provinsi Jawa Timur dapat di simpulkan bahwa potensi unggulan ekonomi yang di miliki adalah sektor Pertambangan dan Penggalian.

Hasil dan analisis algoritma FCM untuk mengelompokan penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro melalui jumlah cluster sebanyak 2 dengan *Average Silhouette* sebesar 0,73. Terdapat 7 kecamatan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tinggi dan tergolong dalam *cluster* 1. Di *cluster* 2 terdapat 21 kecamatan dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang rendah dibandingkan dengan *cluster* 1. Berdasarkan cluster tersebut permasalahan sosial tertinggi di kabupaten Bojonegoro adalah fakir miskin.

5.2 Rekomendasi

Pada dasarnya, penelitian ini sudah berjalan dengan baik. Namun, dapat menggunakan optimasi algoritma genetika atau metode pengelompokan lainnya dengan kinerja yang lebih baik untuk penelitian selanjutnya. Perlu dilakukan kajian–kajian lanjutan dengan menggunakan variabel– variabel diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan adanya hubungan sebab-akibat dan hubungan jangka panjang antara potensi ekonomi dan permasalahan sosial, diharapkan pemerintah dapat mengupayakan permasalahan sosial tersebut lebih rendah dibandingkan laju potensi ekonomi di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. 2022. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2022 Kabupaten Bojonegoro*. Pemkab Bojonegoro.
- Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro. 2023. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023*. Pemkab Bojonegoro.
- Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro. 2018. *Basis Data Terpadu (BDT) Kemiakian Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013, 2017, 2018*. Pemkab Bojonegoro.
- Arsyad, Lincoln, 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2022*. Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022*. Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Kabupaten Bojonegoro Dalam Angka*. Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2022*. Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bojonegoro Menurut Lapangan Usaha*. Kabupaten Bojonegoro.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2022*. Provinsi Jawa Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Profil Kemiskinan di Jawa Timur Maret 2022*. Provinsi Jawa Timur
- Kuncoro, Mudrajat. 2010. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P., 2011, *Pembangunan Ekonomi Jilid Satu, Edisi Kesembilan Terjemahan*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Achmadi. 2015. *Memahami Pola-Pola Keluar dari Kemiskinan : Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro*. Volume 19 Nomor 02.
- Adhitama, Odha. 2015. *Kontribusi Sektor Migas Terhadap Penerimaan Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Bojonegoro*. Volume 2 Nomor 3 Hal. 492-498.
- Cica. 2016. *Studi Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna*. Volume 1 Nomor 1 hal. 106-118.
- Endang. 2017. *Analisi Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro*. JEMES.UNIGORO
- Fitradhy, Ardiyanto, 2013. *Analisis Konsentrasi Spasial Kemiskinan di Jawa*, Tesis tidak dipublikasikan, Program Pasca Sarjana, FE, UGM, Yogyakarta.

- Hulme, D. and A. Shepard 2013 *Conceptualizing chronic poverty*, World Development 31 (3): 403–24.
- Suryaningsung, Sri, dkk. *Tata Kelola Pemerintahan dan Potensi Sumber Daya Bojonegoro Untuk Peningkatan Kesejahteraan*. 2018.
- Syawie, Muhammad. 2011. *Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial*. Volume 16 Nomor 03.
- Tri Wahyu Rejekiningsih, 2011. *Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural*. Volume 12 Nomor 1 hal. 28-44.
- Yocoub, Yarlina. 2012. *Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Volume 8 Nomor 3 hal. 176-185.
- Yuni, Nurul, Roni. 2019. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Bersama Usaha Bersama (KUBE)*. Volume 13 Nomor 4 Hal. 104-109.
- Zainudin. (2017). *Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Sebagai Bahan Konstruksi Pembangunan Waduk Dongseng Bojonegoro*. Volume 1 Edisi 2 ISSN 2502-3152. UNIGORO
- Zulaika, Siti. 2018. *Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 1981-2008*. Volume 6 Nomor 2.
- Kecuk Suhariyanto, 2011. “Jumlah Si Miskin,” Kompas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 23 Tahun 2011 Tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi Serta Pengolahan Minyak Dan Gas Bumi Di Kabupaten Bojonegoro. [http://www.jariungu.com/peraturan_detail.php?Peraturan-Daerah-Kab--Bojonegoro-\(Perda-Kab--Bojonegoro\)-23-tahun-2011-tentang-Percepatan-Pertumbuhan-Ekonomi-Daerah-Dalam-Pelaksanaan-Eksplorasi-Dan-Eksploitasi-Serta-Pengolahan-Minyak-Dan-Gas-Bumi-Di-Kabupaten-Bojonegoro&idPeraturan=28196#:~:text=Peraturan%20Daerah%20Kab.,Gas%20Bumi%20Di%20Kabupaten%20Bojonegoro](http://www.jariungu.com/peraturan_detail.php?Peraturan-Daerah-Kab--Bojonegoro-(Perda-Kab--Bojonegoro)-23-tahun-2011-tentang-Percepatan-Pertumbuhan-Ekonomi-Daerah-Dalam-Pelaksanaan-Eksplorasi-Dan-Eksploitasi-Serta-Pengolahan-Minyak-Dan-Gas-Bumi-Di-Kabupaten-Bojonegoro&idPeraturan=28196#:~:text=Peraturan%20Daerah%20Kab.,Gas%20Bumi%20Di%20Kabupaten%20Bojonegoro) . diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 15.43 WIB
- Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro No. 7 tahun 2013 tentang RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013-2018. https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=421. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 pukul 10:54 WIB
- Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro No. 11 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Bojonegoro. https://kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/?wpfb_dl=926. Diakses pada tanggal 17 Desember 2024 23.45 WIB
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang OTODA. <https://komisiinformasi.go.id/?p=1628>. Diakses pada tanggal 18 Desember 2024 pukul 13.23 WIB.

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1. Bukti *Submit* Artikel

The screenshot shows a web browser window with the URL `journal.unimma.ac.id/index.php/bisnisekonomi/authorDashboard/submission/8265`. The page is the author dashboard for the journal "Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi". The submission title is "Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah, Hukum Weiger dan Teori Keynes". The submission is in the "Review" stage. The submission files section shows a file named "ell_f9, Artikel Jurnal UNIMMA Erika Febrianti_UNDIP.docx (4)" with a size of 29393-4. The pre-review discussions section shows a comment from "ell_f9" with 0 replies.

Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi Tasks 0 English View Site ell_f9

Submission Library View Metadata

Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah, Hukum Weiger dan Teori Keynes

Submission Review Copyediting Production

Submission Files Search

29393-4	ell_f9, Artikel Jurnal UNIMMA Erika Febrianti_UNDIP.docx (4)	Article Text
---------	--	--------------

Download All Files

Pre-Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed
Comments for the Editor	ell_f9	-	0	☐

Lampiran 2. OJS Terindeks SINTA



JURNAL EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
P-ISSN : 14112280 <> E-ISSN : 26854767

 3.22222 Impact	 5971 Google Citations	 Sinta 4 Current Accreditation
--	---	---

[Google Scholar](#) [Garuda](#) [Website](#) [Editor URL](#)



UNIVERSITAS BOJONEGORO
FAKULTAS EKONOMI

Website : <https://f.ekonomi.unigoro.ac.id> e-mail : fe@unigoro.ac.id

Sekretariat: Kampus Kalirejo Jl. Lettu Suyitno No. 02 Telp./Fax. (0353) 889006 Bojonegoro

Nomor : 1111/FE.UB/X/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : **Permohonan Pengajuan Dana Penelitian**

Kepada Yth:
Rektor Universitas Bojonegoro
Di
Bojonegoro

Menindak lanjuti pengumuman/himbauan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro, bahwa setiap Dosen di Universitas Bojonegoro wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dilaksanakan melalui Hibah Internal Dosen. Maka bersama ini kami mengajukan usulan dana hibah internal dosen dengan keterangan berikut:

Nama Dosen : Erika Febrianti, S.E.
NIDN : -
Judul Proposal : Identifikasi potensi ekonomi di kabupaten bojonegoro tahun
2018-2022

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Bojonegoro, 31 Oktober 2024
Dekan,

Endang, S.E., M.M.
NIDN. 07 2505 8006

Tembusan kepada:

Yth. Ketua Yayasan Suyitno Bojonegoro
Yth. Ketua LPPM Universitas Bojonegoro